

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI POLA PEMBINAAN WARGA BINAAN  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**NUR KHALISAH NAISY**

**NIM: 10500113132**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN ALUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Khalisah Naisy

Nim : 10500113132

Tempat tanggal Lahir : Sinjai, 14 Juli 1995

Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Pidana

Alamat : Jl. Lasuloro Raya Komp Bangkala Dalam, Perumnas Antang Blok I

Judul : ” Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar serjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Agustus 2017

Penyusun

NUR KHALISAH NAISY

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “TINJAUAN HUKUM MENGENAI POLA PEMBINAAN WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYRAKATAN KELAS 1 MAKASSAR”, yang disusun oleh Nur Khalisah Naisy, NIM: 10500113132, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 28 Agustus 2017 M  
9 Dzulhijjah 1438 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H, M.H.	(.....)
Munaqisy I	: St. Nurjannah, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Ahkam Jayadi, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP: 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan limpahan rahmatnya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“TINJAUAN HUKUM POLA PEMBINAAN WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR.** Yang menjadi suatu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan tingkat strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salawat dan salam juga penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, selaku nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam menulis skripsi ini tentunya banyak rintangan dan tantangan yang penulis hadapi, namun berkat rahmat Allah SWT serta bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat dirampungkan, meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada orang tua penulis, kepada Ayah Nur Asyik, S.Sos, Ibu Nur Nani yang senantiasa mendoakan, merawat, mendidik dan memotivasi penulis tanpa henti dengan penuh kasih sayang. Kepada kakak sepupu penulis, Rati Ayu Pusvitasari, S.E yang setiap saat mengisi hari-hari penulis dengan penuh



kebersamaan, canda dan tawa dan tiada hentinya memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Abdul Halim Talli, S.Ag.,M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Dr. Hamsir, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II, Dr. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Istiqamah, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Rahman Syamsuddin, S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi jurusan.
5. Bapak Ahkam Jayadi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Fadli Andi Natsif, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II dan juga selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu St. Nurjannah, S.H.,M.H selaku Penguji I dan Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.SI selaku Penguji II atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat lebih baik dari sebelumnya.
7. Seluruh dosen UIN Alauddin Makassar terimakasih atas bantuan bekal disiplin ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di bangku kuliah.

8. Seluruh Staff Akademik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Kepada para Pimpinan dan Staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang senantiasa membantu dan memberikan data serta informasi yang berguna selama penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar Paduppai dan keluarga besar Lebu yang selalu memberikan doa, motivasi dan bimbingannya selama ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya yang mendoakan, menyemangati, membantu saya, Hasnita Tahir, Sartika, Nur Inayah, Fitasari, Nurfaidah, Nurul Riska Amalia, Nurul Wahyuni Aris, Faliana Nur Saputri, Sri Sulviani, Muh. Thamrin Chaier, Musyahwir Tahir, Ilham Suyuti Ikhsan, Mudhar Aziz Manuruki, Muh. Hasan, Nurjayadi, Kurnia DS
12. Saudara-saudarai seperjuangan tercinta ILMU HUKUM angkatan 2013, saudara-saudari seperjuangan di kelas ILMU HUKUM 7.8, ILMU HUKUM C, Konsentrasi Pidana B. Kakak dan adik ILMU HUKUM yang telah memberika canda, tawa, suka, cita dan pelajaran selama ini kepada penulis.
13. Teman-teman KKN Angkatan 53 Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Nuralfianti, Fatihatul Hidayah, Maulana Afsan, Arga Prayuda, Muhammad Arham Lathief, Deby Rara Yolanda, Jumria Harimin, Azma, Supriyadi Dwi Apriyanto, Samsir, Fajri Rahman, Ari Wahyudi, yang telah menjadi keluarga penulis selama melaksanakan KKN. Serta seluruh masyarakat Barombong

yang telah menyambut baik kedatangan kami dan memberikan banyak pelajaran hidup selama melaksanakan KKN.

14. Sahabat-Sahabat Seperjuangan Nurfajrianti, Iin, Ninna, Anti, Fatma, Irin, Santi, Udin, Dilla, Ichy, Fitri, Ifha, Uun, Riztha, Ancha, Baso, Fandi, Aqil, Lukman, Sidin, Heri, Pangky terima kasih atas persahatannya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua untuk mencapai harapan dan cita-cita di dunia dan di akhirat. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis serta para pembaca. Penulis akhiri dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Alamiin. *Wassalamualaikum Wr.Wb.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Samata, 15 Agustus 2017

Penulis

ALA UDDIN  
M A K A S S

**NUR KHALISAH NAISY**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-12
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	13-34
A. Pemidanaan .....	13
B. Lembaga Pemasyarakatan .....	19
C. Hak Asasi Manusia.....	25
BAB III METODE PENELITIAN .....	35-38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	35

B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	36
D. Metode Pengumpulan Data .....	37
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	38
 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	 39-70
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Proses Pembinaan Warga Binaan di dalam lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ditinjau dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	42
C. Hambatan-hambatan yang Dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam Melakukan Proses Pembinaan pada Warga Binaan.....	65
 BAB V PENUTUP.....	 71-72
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
 DAFTAR PUSTAKA .....	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hak Warga Binaan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan .....	51
Tabel 2 Hak Warga Binaan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan .....	54
Tabel 3 Hak Warga Binaan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan .....	61
Tabel 4 Jumlah Warga Binaan dan Kapasitas yang Tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Bulan Agustus 2017 .....	69

## **ABSTRAK**

**Nama : Nur Khalisah Naisy**  
**Nim : 10500113132**  
**Fakultas/jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum**  
**Judul : Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar**

---

Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu 1) Apakah dalam proses pembinaan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia? 2) Hambatan-hambatan apa yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam melakukan proses pembinaan pada warga binaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik.

Hasil penelitian menunjukka bahwa 1) Proses pembinaan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dengan mengacu pada pasal 28, 28A-28J UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, Berdasarkan tahapan pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan masih sangat menjunjung tinggi HAM sehingga dalam proses pembinaannya tersebut masih sangat terjaga agar tidak terjadinya pelanggaran HAM terhadap para warga binaan. 2) Hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam melakukan proses pembinaan pada warga binaan dapat ditemukan dalam beberapa hal diantaranya sumber daya manusia (petugas Lapas) masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan, Minimnya dana/anggaran untuk pembinaan warga binaan, serta sarana prasarana yang kurang memadai.

Pemerintah perlu memperketat program pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan maupun rutan agar pembinaan tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi narapidana. Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem pembinaan mulai dari sumber daya manusia (petugas), dana/anggaran serta sarana dan prasarana Lapas.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Hak tersebut sangat asasi karena langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Setiap orang berhak untuk mempertahankan/membela diri terhadap setiap ancaman yang tertuju kepada keselamatan jiwanya. Hak hidup ini merupakan HAM maka perampasan terhadap kemerdekaan dan kebebasan seseorang serta nyawa orang lain pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM berat. Di dalam Pembukaan UUD 45 aspek kemanusiaan yang sangat asasi yaitu "kemerdekaan ialah hak segala bangsa" mengandung konsekuensi yang mendasar. Di dalam pernyataan di atas terkandung dengan jelas pengakuan bahwa kemerdekaan ialah hak setiap orang/individu anggota masyarakat. Jadi kemerdekaan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat/bangsa. Dalam hal ini ada dua aspek yang mendasar, yaitu: (1) Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan, (2) Hak untuk "berkehidupan kebangsaan yang bebas". Hak akan kemerdekaan dan kebebasan seseorang mencakup makna dan aspek atau ruang lingkup yang sangat luas. Seseorang tidak hanya bebas dan merdeka terhadap kemerdekaannya sebagai manusia tetapi juga menentukan, melangsungkan dan mempertahankan eksistensinya, tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non fisik.



Kemerdekaan dan kebebasan seseorang untuk bergerak, bepergian kemana saja untuk berhubungan dengan siapa saja.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Usaha nyata dalam menggalang kesadaran global untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan HAM terwujud setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) selanjutnya disingkat (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Kota Paris. Secara tegas dan jelas DUHAM mengingatkan kepada siapa pun agar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>2</sup>

Kepedulian Indonesia terhadap perlindungan HAM, dapat dilihat dari hasil amandemen kedua (UUD NRI Tahun 1945) Tahun 2000 yang merinci tentang HAM, yaitu Bab XA terdiri dari Pasal 28A sampai Pasal 28J.

Sebelum adanya amandemen UUD 1945 penghargaan terhadap HAM sudah dipertegas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM. Secara teknis operasional dibentuk lagi Undang-

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>2</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 2.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UUPHAM). Kemudian ditindaklanjuti dengan dengan UU No. 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UUPHAM).<sup>3</sup>

Usaha ke arah perlindungan dan penegakan HAM yang lebih baik dan lebih maju, pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 dengan tujuan membantu mengembangkan kondisi bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.<sup>4</sup>

Undang-Undang HAM secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain

---

<sup>3</sup>Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 2.

<sup>4</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 7.

mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Sudah menjadi kodrat bagi setiap manusia untuk hidup sebagai makhluk sosial, hidup di antara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Walaupun secara teorinya memiliki kebutuhan dasar yang sama, tidak serta merta kebutuhan dan kepentingan mereka selalu sama di saat yang sama, kadang bisa sama tetapi kadang kala bisa berbeda. Perbedaan akan berubah menjadi pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya.<sup>6</sup>

Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan. Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.<sup>7</sup>

Jaminan perlindungan HAM yang telah diatur tidak berarti akan mengorbankan upaya pemberantasan tindak pidana. Keseimbangan antara dua kepentingan yakni perlindungan HAM dan kepentingan penegakan hukum harus

---

<sup>5</sup> Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

<sup>6</sup> Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media 2014), h. 13-14.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h. 1-3.

berjalan seiring, karena jika hanya kepentingan penegakan HAM saja yang diutamakan, maka akan terjadi pengabaian HAM orang lain terutama korban kejahatan dan akan menghambat proses peradilan pidana. Sebaliknya jika hanya mengutamakan penegakan hukum, maka HAM tersangka atau terdakwa akan terabaikan.<sup>8</sup>

Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5: 32 menjelaskan bahwa:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh sesama manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah setelah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di bumi.”

Ayat tersebut mengindikasikan kepada kita akan kewajiban menjaga kesatuan umat manusia, menjaga kelangsungan hidup mereka, menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan setiap individu dan memenuhi hak setiap individu dan

---

<sup>8</sup>Dr. Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2014), h. 63-64.

memenuhi hak setiap individu. Jika melanggar dan merusak kehormatan individu itu berarti merusak kehormatan seluruh manusia, sebaliknya ketika kita memenuhi hak-hak individu maka kita telah memenuhi hak-hak seluruh manusia.

Salah satu masalah HAM yang menurut penulis perlu mendapat perhatian serius yaitu mengenai HAM terhadap narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan, yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah melalui aparatnya. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Namun pada kenyataannya masih sering terjadi penyiksaan terhadap warga binaan yang dilakukan oleh Petugas Lapas, seperti yang terjadi di Lapas Kelas II B Meulaboh yakni seorang warga binaan yang bernama Ade Saswito mengalami penganiayaan terhadap Petugas Lapas.

Berkaitan dengan hal tersebut terjadinya tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap warga binaan yang dilakukan oleh oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan adanya kegagalan manajemen dan lemahnya pengawasan secara institusional. Sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi juga memperlihatkan minimnya kualitas pengawasan dan pembinaan dari pimpinan serta rendahnya perspektif penghormatan petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap hak asasi manusia warga binaan. Sejatinya, keberadaan Lembaga Pemasyarakatan harusnya mampu menjadi sarana pembinaan terhadap seluruh narapidana agar pada

saat mereka selesai menjalani masa hukuman, mereka dapat hidup dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam uraian latar belakang diatas hal tersebut menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah terkait dengan judul skripsi yang dibahas yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pembinaan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam melakukan proses pembinaan pada warga binaan ?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Dalam penelitian ini difokuskan penelitiannya pada pembinaan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan agar Undang-Undang dalam Pemasyarakatan dapat sejalan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang terdapat dalam skripsi ini.

Kata “Tinjauan” menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pandangan, pendapat untuk memecahkan suatu persoalan.

Kata “Hukum” adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.

Kata “Pembinaan” menurut Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 1 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Kata “Warga Binaan” menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.<sup>10</sup>

- a. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan
- b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
  1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

---

<sup>9</sup>Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 5

2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orangtua walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan, anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan yang merupakan pranata untuk melakukan bimbingan.<sup>11</sup>

Kata “Perspektif” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Sudut pandang; pandangan<sup>12</sup>

Kata “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>13</sup>

#### ***D. Kajian Pustaka***

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan dan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan Pasal 1 Ayat 7-9

<sup>12</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002),h.152

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentan Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1



Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun kajian kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

Ruslan Renggong dalam bukunya “Hukum Acara Pidana – Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia”. Dalam buku ini membahas aspek penting dalam hukum acara pidana, yakni perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan hal yang tepat disaat penegakan hukum di negeri ini belum sepenuhnya terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Mujaid Kumleko dalam bukunya “Fiqh HAM”. Dalam buku ini membahas mulai dari konsep manusia dalam Al-Qur’an, HAM dalam perspektif Islam dan Barat hingga HAM dalam Perspektif dua tokoh besar yang mewakili zamannya masing-masing yaitu Al-Maududi dan An-Na’im.

Bambang Waluyo dalam bukunya “Pidana dan Pemidanaan”. Dalam buku ini memaparkan tentang pidana, serta pemidanaan yang sekaligus paparan mengenai peran masing-masing penegak hukum.

Fadli Andi Natsif dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan HAM – Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional”. Dalam buku ini membicarakan terkait kejahatan HAM, yang terutama difokuskan kepada kejahatan atau pelanggaran HAM berat.

Rahman Syamsuddin, dalam bukunya yang berjudul “Merajut Hukum di Indonesia”. Dalam buku ini membahas mengenai bentuk hukum dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

C. Djisman Samosir dalam bukunya yang berjudul “Penologi dan Pemasyarakatan”. Dalam buku ini membahas tentang kinerja Polisi, Jaksa, Advokat, jenis-jenis pidana, tujuan pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, tujuan Lembaga Pemasyarakatan, hak-hak narapidana dan peranan masyarakat dalam pembinaan narapidana.

Simorangkir, dalam bukunya yang berjudul “Kamus Hukum”. Beliau memberikan gambaran tentang pengetahuan terhadap istilah-istilah hukum yang masih asing bagi masyarakat bahkan mahasiswa hukum.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Arah dan sasaran tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah dalam proses pembinaan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam melakukan proses pembinaan pada Warga Binaan.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi dalam pemahaman kita mengenai tinjauan hukum pola pembinaan warga binaan dari perspektif HAM. Secara detail kegunaan tersebut dapat dibagi sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan ilmu hukum khususnya tentang HAM sehingga literatur yang membahas tentang HAM khususnya perlindungan HAM terhadap narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan berkembang sesuai dengan kondisi kekinian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberi masukan bagi penelitian lebih lanjut.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis dapat di sebutkan sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam pembaharuan sistem pemasyarakatan yang dapat menjamin tegaknya HAM bagi narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan dengan tetap memperhatikan hak-hak petugas pemasyarakatan sebagai seorang manusia yang mempunyai kekurangan, keterbatasan dan juga kelebihan.
2. Bagi petugas pemasyarakatan, agar dapat memahami tentang makna HAM dan juga dapat memberikan pengenalan HAM bagi warga binaan pemasyarakatan, sehingga masing-masing dapat menghindari perbuatan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM.
3. Bagi warga binaan pemasyarakatan, agar dapat memahami tentang HAM. Dengan memahami HAM akan diharapkan mereka dapat terhindar dari perbuatan pelanggaran HAM dan kelak nanti selesai menjalankan hukumannya dapat turut serta membangun negara ini dalam upaya penegakan HAM.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### *A. Pidanaaan*

##### **a. Pengertian Pidanaaan**

Pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana pokok itu terdiri atas:

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan, dan
4. Pidana denda

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari putusan hakim.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lamintang, dkk, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.33-36.

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Sudarto, pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Beliau berpendapat penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Pemidanaan (*punishment*) adalah hasil pemeriksaan di depan pengadilan yang berwujud keputusan hakim atau vonis. Putusan pidana setidak-tidaknya harus mencerminkan sifat futuristik di dalamnya, hal inilah nantinya yang diharapkan dari pemidanaan tersebut. Oleh karena itu, hakim harus menyadari makna akan keputusannya. Keputusan pidana merupakan suatu konsekuensi yang sangat besar. Pemidanaan adalah tingkat puncak daripada suatu penyelesaian yang rumit dari sistem hukum acara pidana yang nyata, yang bertujuan akhir membentuk orang yang melakukan kejahatan agar berguna dan dapat dipercaya. Keputusan pidana harus lengkap memuat apa yang akan dilakukan terhadap terpidana, keputusan pidana sebagai dampak sosial hanya mempunyai arti bagi individu yang mempertaruhkan hidup dan kebebasannya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Kadri Husin, dkk, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),h.23

## **b. Tujuan Pemidanaan**

Terdapat beberapa Teori Pemidanaan atau Dasar-dasar Pembenaan atau Tujuan Pidana, sebagai berikut:

### **1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/Vergelding theorieen*)**

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Immanuel Kant dalam “*Philosophy of Law*”, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni seseorang harus dipidana oleh hakim oleh karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.

Hegel berpendapat bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan “*negation der negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).<sup>3</sup>

Jadi menurut mereka yang menganut paham “retributif”, memidana pelaku tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang baik oleh karena setiap orang yang

---

<sup>3</sup> Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media 2014),h.244-245

melakukan suatu tindakan harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan harus menerima ganjaran sesuai tindakan yang dilakukan. Penganut paham “retributif” tidak berusaha memahami berbagai kondisi yang ada di masyarakat. Berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakannya tidaklah penting bagi mereka yang menganut paham “retributif”. Padahal masalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat harus digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya.<sup>4</sup>

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/doeltheorieen*)

Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, sehingga Johannes Andenaes menyebutnya sebagai “teori perlindungan masyarakat”.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga teori ini disebut juga sebagai teori tujuan (*Utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah

---

<sup>4</sup>C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 78.

terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, teori tujuan ini dimaksudkan sebagai pembinaan narapidana dan anak didik, berarti ada individualisasi hukum pidana. Yang dimaksud dengan individualisasi hukum pidana adalah bahwa hukum pidana itu berorientasi pada narapidana dan anak didik. Diorientasikannya hukum pidana pada narapidana dan anak didik sejalan dengan pemikiran Modderman yang menyatakan hukum pidana bersifat ultimum remedium artinya sebagai upaya terakhir dan kita perlu mengingat pada keberadaan hukum pidana. Penerapan hukum pidana yang tidak hati-hati tanpa dasar hukum yang kuat dan tidak didasarkan pada keadilan bisa membahayakan narapida dan anak didik.

Sesuai dengan adanya pidana penjara dan kurungan, dan pelaksanaan pidana penjara itu harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19995 Tentang Pemasyarakatan, maka teori tujuan dianut di Negara kita.<sup>6</sup>

### 3. Teori Gabungan (*Verenegings Theorieen*)

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

---

<sup>5</sup> Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media 2014), h. 246.

<sup>6</sup> C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 96.



Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Selain teori pidanaaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pidanaaan. Di indonesia sendiri, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidanaaan pada pasal 54, yaitu:

1. Pidanaaan bertujuan
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang berguna
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
  - d. Membebaskan rasa bersalah terpidana
2. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 191-192.

## ***B. Lembaga Pemasyarakatan***

### **a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan.

Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar mereka setelah selesai menjalankan pidana mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>9</sup>

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasar Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan

---

<sup>8</sup>Lamintang,dkk, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.165

<sup>9</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*” (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.105

kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.<sup>10</sup>

Masuknya terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Hal demikian dilakukan dengan cara memberikan mereka pendidikan sekolah, moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan baru di sekitarnya dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 maka Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan tahapan berikut :

1. Tahap awal
2. Tahap lanjutan

---

<sup>10</sup> Widodo, Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 35-36

<sup>11</sup> Kadri Husin, dkk, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.125

### 3. Tahap akhir

Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap awal meliputi:

1. Masa pengamatan
2. Pengenalan
3. Penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan
4. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
5. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
6. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

Pembinaan tahap lanjutan dibagi dua yaitu:

- a. Pembinaan tahap lanjutan pertama, yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari masa pidana
- b. Tahap lanjutan kedua yaitu sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- Perencanaan program pembinaan lanjutan
- Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- Pelaksanaan dan pelaksanaan program asimilasi

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- Perencanaan program pembinaan integrasi

- Pelaksanaan program integrasi
- Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Tahap-tahap pembinaan narapidana yang dikemukakan di atas, merupakan sarana bagi petugas lembaga pemasyarakatan untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan.<sup>12</sup>

#### **b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dari sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.

Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai undang-undang bertujuan agar para narapidana dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan, karena masyarakat sadar pada saat narapidana dan anak didik di penjara terjadi prisonisasi,

---

<sup>12</sup> C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 170-171

yaitu pengambil-alihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat dan budaya para narapidana dan anak didik pada saat melakukan tindak pidana.

Dengan terjadinya prisonisasi pengetahuan narapidana dan anak didik di bidang kejahatan akan semakin bertambah. Pemahaman masyarakat mengenai kondisi yang dikemukakan di atas akan membuat masyarakat semakin curiga dan menjaga jarak bahkan mungkin menutup diri bagi para narapidana atau anak didik tersebut.

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindakan pidana dan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-01.PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 Ayat (1) tersebut, Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I
- 2) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A
- 3) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B

---

<sup>13</sup> C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 128-129.

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

### **c. Asas-asas Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- c. Pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan di landaskan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.<sup>14</sup>

### **C. Hak Asasi Manusia**

#### **a. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut John Locke, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

---

<sup>14</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 107

<sup>15</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga(negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet.V (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 148



hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>16</sup>

Manusia tidak diperbolehkan semena-mena dalam menggunakan haknya. Selain mempunyai hak-hak dasar, manusia juga mempunyai kewajiban-kewajiban dasar kepada Tuhan, sesama manusia dan makhluk lain. Kewajiban hak dasar manusia apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan tegaknya hak asasi manusia.<sup>17</sup>

#### **b. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia**

Dalam Pembukaan UUD 1945 menjunjung tinggi harkat, martabat, serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi ditegaskan bahwa hak setiap bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah/berperwakilan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berperikeadilan dan berkeyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembukaan UUD 1945 mengakui adanya rahmat Tuhan, sehingga hak asasi tidak lepas dari pemberian tuhan.<sup>18</sup>

Konsepsi HAM di Indonesia dapat dilihat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan atau amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 sampai 2002 yang tentu berdampak pada pemahaman dan konsep HAM. Konsep HAM Indonesia mengalami perubahan dan kemajuan yang berarti dengan dicantumkannya persoalan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1

<sup>17</sup> Mujaid Kumleko, dkk, *Fiqh HAM* (Malang: Setara Press, 2015), h. 5

<sup>18</sup> H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 61

HAM secara tegas dalam bab tersendiri yaitu Bab XA mulai Pasal 28A sampai 28J. Salah satu penegasan konsep HAM ini dapat dibaca dalam Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.<sup>19</sup>

Selain pengaturan HAM di dalam Bab XA UUD 1945, Bab III UUHAM (UU No.39 Tahun 1999) dengan judul Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia menentukan bentuk-bentuk HAM secara lebih terperinci dan lengkap. Hak-hak tersebut antara lain: hak untuk hidup (Pasal 9), hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10), hak mengembangkan diri (Pasal 11,12,13,14,15 dan 16), hak memperoleh keadilan (Pasal 17,18 dan Pasal 19), hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20,21,22,23,24,25,26 dan Pasal 27), hak atas rasa aman (Pasal 28,29,30,31,32,33,34 dan Pasal 35), hak atas kesejahteraan (Pasal 36,37,38,39,40,41 dan Pasal 42), hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 dan Pasal 44), hak wanita (Pasal 45,46,47,48,49,50 dan Pasal 51), dan hak anak (Pasal 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 dan Pasal 66).

Di dalam UUHAM Bab VI, diatur pula kewajiban dasar manusia (Pasal 67,68,69 dan Pasal 70). Pasal 67 UUHAM menentukan bahwa setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum internasional mengenai HAM yang telah

---

<sup>19</sup> Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),h. 14.

diterima oleh negara Republik Indonesia. Demikian pula dalam pasal 69 ayat (1) UUHAM ditentukan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun Pasal 69 ayat (2) UUHAM menentukan bahwa setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.

Jaminan dan pengakuan HAM dalam UUD 1945 dan UUHAM pasca amandemen, merupakan pencapaian dan menjadi tantangan pada saat ini dan masa datang, yaitu mewujudkan jaminan dan pengakuan HAM dalam kehidupan nyata. Artinya, jangan sampai terjadi jaminan dan pengakuan HAM dalam konstitusi hanya sebatas normatif belaka, yang bertolak belakang dengan praktik empirisnya. Perlu disadari bahwa upaya penegakan HAM pada akhirnya terletak pada pemegang otoritas yang memiliki kewenangan penegakan HAM.<sup>20</sup>

### **c. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Warga Binaan**

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga binaan sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

---

<sup>20</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), h.59-61

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat; dan
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hak-hak warga binaan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, akan dijabarkan lebih lanjut mengenai:

a. Melakukan Ibadah Sesuai Agama dan Kepercayaan

Setiap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan. Dan pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan bimbingan keagamaan.

b. Mendapat Perawatan, Baik Perawatan Rohani Maupun Jasmani

Setiap wargabinaan dan anak didik pemsyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa:

1. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi
2. Pemberian perlengkapan pakaian, dan
3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

c. Menyampaikan Keluhan

Setiap wargabinaan dan anak didik pemsyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemsyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan.

d. Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengurangan masa pidana atau remisi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.

Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 diatur mengenai siapa-siapa yang berhak mendapatkan remisi dan apa syarat remisi tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- (1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi

(2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) Berkelakuan baik dan
- (b) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan
- (c) Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) Berkelakuan baik dan
- (b) Telah menjalani 1/3 masa pidana.

(3) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>21</sup>

e. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat sebagai hak narapidana tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, akan tetapi juga diatur di dalam Pasal 15, 15a, 15b, dan Pasal 16 KUHP.

---

<sup>21</sup> C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia 2012), h.132-133

Sehubungan dengan syarat-syarat pembebasan bersyarat di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01 Pk. 04-10 Tahun 2007 diatur mengenai syarat substantif yaitu:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana
- b. Telah menunjukkan kembangbangan budi pekerti dan moral yang positif
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan,
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin, sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir dan masa pidana yang telah dijalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.<sup>22</sup>

Salah satu instrumen perjanjian internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan UU No. 5 Tahun 1998 berkenaan dengan peningkatan penghargaan hak asasi manusia adalah *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) Tahun 1975.

---

<sup>22</sup>C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 139-140

Tujuan pemetintah meratifikasi konvensi ini, dapat disimpulkan pada bagian III poin 3 Undang-Undang ini, yaitu untuk meningkatkan perlindungan hukum secara lebih efektif sehingga akan lebih menjamin hak-hak setiap warga negara bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya.

Pada dasarnya konvensi ini melarang penyiksaan, baik fisik maupun mental, yang bersifat merendahkan martabat manusia. Pelanggaran penyiksaan yang diatur dalam konvensi ini, mulai dari Pasal 1-16, tidak mencakup rasa sakit atau penderitaan yang timbul, melekat, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Artinya, semua bentuk penyiksaan bukan yang tidak timbul, melekat, atau diakibatkan suatu sanksi hukum dilarang oleh konvensi ini.

Ini berarti bahwa negara bersama individu mengemban tanggung jawab besar dalam memberi perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi warga negara sebagaimana disebutkan dalam Mukadimah DUHAM.

Ketentuan Pasal 7 DUHAM dikaitkan dengan Pasal 26 konvensi ini, menyebutkan bahwa semua orang adalah sama kedudukannya di hadapan hukum, dan mempunyai hak akan perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini, undang-undang harus melarang setiap diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, atau



pandangan lain, kebangsaan, atau tingkat sosial, kekayaan, asal-usul, keturunan, atau status lain.

Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, juga menegaskan suatu hal penting sehubungan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam proses hukum. Ketentuan dimaksud adalah ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) yang mengatur bahwa: “*all person deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.*” Dengan demikian, setiap orang yang sedang dicabut kebebasannya harus diperlakukan sesuai dengan perikemanusiaan dan tetap memberikan rasa hormat terhadap harkat yang melekat pada pribadi manusia.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) di atas, tampak jelas bahwa betapa harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi, hingga orang yang dicabut kebebasannya sekalipun harus tetap diperlakukan secara manusiawi. Hal ini juga menunjukkan bahwa demikian melekatnya nilai-nilai kemanusiaan pada diri manusia, sehingga tidak dapat diabaikan bahkan harus tetap dihormati dalam kondisi apapun.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 260-261.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di wilayah Kota Makassar. Difokuskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah instansi yang berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam rangka pendekatan pada objek yang akan diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis Sosiologis, artinya penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian menuju

pada indentifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*<sup>1</sup>).

### C. *Sumber Data*

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>2</sup>, yakni warga binaan, wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi<sup>3</sup>, yakni data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan<sup>4</sup>
  - a. Bahan hukum primer, berupa perundang-undangan
  - b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel ilmiah dan lain-lain
  - c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-PRESS, 1986), h.10

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-PRESS, 1986), h.12.

<sup>3</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010) h. 57.

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 392

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi, yaitu pengamatan terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini observasi yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengamatan
2. Wawancara (*interview*), yaitu sehubungan dengan kelengkapan data yang dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan (LAPAS).
3. Kuesioner (angket), yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan sejumlah lembaran pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Angket dengan format dan sistematika yang sederhana namun jelas dapat menggambarkan keadaan<sup>5</sup> para warga binaan. Dalam hal ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah memiliki opsi jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban yang disediakan.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki pengumpulan data di lapangan adalah wawancara, dokumen, kuesioner dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

---

<sup>5</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media ,2012), h. 93.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis***

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah, lalu dianalisis secara kualitatif, yaitu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif dijalankan dengan mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 1112 orang total warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sedangkan dilakukan penarikan sampel sebanyak 25 orang. Kemudian proses penarikannya dengan cara *simple random sampling design*, dengan cara pelaksanaannya yang sederhana dengan sistem acak.

Kemudian data yang diperoleh dari responden, disajikan dalam bentuk tabel grafik atau biasa disebut tabulasi frekuensi dengan rumusan sebagai berikut:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan : P = Presentase

N = Jumlah sampel

F = Frekuensi Jawaban Responden

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sulawesi selatan yang bertugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), baik yang bersifat teknis substantif maupun administratif.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada mulanya berlokasi di jalan Ahmad Yani Makassar dan pada tahun 1975 akibat perluasan kota akhirnya pindah ke lokasi yang baru yakni di jalan Sultan Alauddin No. 191 Makassar.

Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar secara umum masih memenuhi persyaratan. Dilihat dari segi keamanan, tembok bangunan kokoh, tembok keliling berikut pagar besi dan kawat berduri dalam kondisi baik, pos-pos pengamanan seperti pos atas masih dalam kondisi baik.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar memiliki Visi : Terwujudnya warga binaan pemasyarakatan yang mandiri dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan.

Dengan diiringi Misi :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Melaksanakan Pembinaan narapidana / anak didik
3. Memberikan pelayanan prima yang berbasis teknologi

4. Melaksanakan pengamanan yang tangguh dan menciptakan suasana aman dan tertib
5. Mewujudkan kepastian hukum Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Adapun sasaran pembinaan dan pembimbingan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas WBP yang awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, seperti :

1. Kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Kualitas Intelektual
3. Kualitas sikap dan perilaku
4. Kualitas profesional/keterampilan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

Itu semua pada dasarnya demi terwujudnya pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dengan menyisipkan target menurunnya angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban, Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi, Semakin menurunnya angka residivis, Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya sub kultur penjara, sehingga akan menghindari yang namanya over kapasitas.

Adapun pembagian ruangan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar antara lain :

- a. Ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
- b. Ruang kantor bersantai

- c. Ruang aula serbaguna
- d. Ruang kunjungan, pembinaan, dan keamanan
- e. Blok penghuni terdiri dari 9 blok (daya tampung 740 orang) :
  - 1. Tempat hunian bagi narapidana umum dan tahanan meliputi blok :
    - Akasia
    - Beringin
    - Cendawa
    - Damar
    - Ebony
    - Flamboyan (Blok Pengasingan)
    - Gaharu
  - 2. Tempat hunian tahanan anak meliputi blok :
    - Hawaii
  - 3. Tempat hunian untuk tahanan korupsi meliputi blok :
    - Intan
- f. Tempat ibadah (Masjid, Gereja)
- g. Ruang Poliklinik
- h. Rumah sakit
- i. Ruang keterampilan kerja
- j. Pos jaga atas 6 unit
- k. Ruang dapur dan gudang
- l. Ruangan sarana olah raga
- m. Rumah dinas pegawai



***B. Proses Pembinaan Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas I Makassar ditinjau dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia***

Masuknya terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan mereka pendidikan, moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup baru setelah mereka bebas.

Warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan mempunyai kedudukan yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu petugas lembaga pemasyarakatan perlu memahami dan mengimplementasikan UU No.12 Tahun 1995, serta UU No.12 Tahun 1995.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Sudarto, pidana pencabutan kemerdekaan lazim disebut pidana penjara. Pidana penjara bukan pidana yang mencabut semua kemerdekaan seorang terpidana, melainkan hanya mencabut kemerdekaan bidang tertentu (misalnya kemerdekaan bergerak dan bersosialisasi dengan anggota masyarakat umum) dan pembatasan kemerdekaan (misalnya pembatasan dalam berkomunikasi).<sup>1</sup>

Adapun Hak Asasi Manusia Warga Binaan yang harus dihormati di Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas

---

<sup>1</sup> Widodo, Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 26

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Lembaga pemasyarakatan dalam peranannya memberikan perlindungan hukum terhadap warga binaan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban dan juga memperhatikan segala bentuk hak, kewajiban dan larangan terhadap warga binaan serta memperhatikan hak asasi yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

#### Pasal 3

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
3. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

#### Pasal 4

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;

9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Untuk menciptakan pembinaan yang tepat waktu dan efisien perlu adanya suatu peraturan yang mengharuskan warga binaan menjalankan serangkaian jadwal kegiatan atau pembinaan itu sendiri agar terciptanya pembinaan yang kondusif dan tepat waktu. Berikut jadwal pembinaan Warga Binaan di Lapas Kelas I Makassar adalah sebagai berikut :

Gambar 1

## Jadwal Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas I Makassar

KEMENTERIAN HUKUM DAN Keadilan, Direktorat Jenderal  
KAPTEN POLASRI SUTAWATI, S.H.  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR  
JL. SULTAN HASANudin No. 101 TELUKKOPPA  
Makassar

JADWAL KEGIATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
KELAS I - MAKASSAR  
TAHUN 2017

NO	HARI	JAM	KISUHAN / PROGRAM	PEJABAT	PENGAWAS / PEMBINA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
01 SENIN		06.45 - 07.00	Apel pagi/istirahat	Sekeloh Penghulu WBP	Sebagai Pengawasan	Raga Melayu - Pagi
		07.00 - 07.45	Pembinaan Makan Pagi	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	
		08.00 - 09.00	Giat Raga - Senam	Sekeloh WBP BLOK A & B	Sebagai Pengawasan	
		09.00 - 12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLOK BUNYUNGAN I</li> <li>- Bina/istirahat, PPH</li> <li>- Bina/istirahat</li> <li>- Pendidikan umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekeloh WBP</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Pembinaan/istirahat</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>
		12.00 - 13.30	13.00 M. A. Apel siang	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	Raga Melayu - Siang
		13.30 - 16.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLOK KURJUNGAN II</li> <li>- Bina/istirahat</li> <li>- Bina/istirahat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekeloh WBP</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>
		16.00 - 17.30	Giat Raga Perawatan	WBP - Bina/istirahat	Sebagai Pengawasan	Raga Melayu - Malam
		17.45 - 18.00	Apel Pengantar Malam	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	
		18.00 - 20.30	Sholat, istirahat malam	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	
		21.00 - 04.00	istirahat / tidur	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Gambar 2

## Jadwal Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas I Makassar

1	2	3	4	5	6	7
02 SELASA		06.45 - 07.00	Apel pagi/istirahat	Sekeloh Penghulu WBP	Sebagai Pengawasan	Raga Melayu - Pagi
		07.00 - 07.45	Pembinaan Makan Pagi	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	
		08.00 - 09.00	Giat Raga - Senam	Sekeloh WBP BLOK A & B	Sebagai Pengawasan	
		09.00 - 12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLOK KURJUNGAN I</li> <li>- Bina/istirahat, PPH</li> <li>- Bina/istirahat</li> <li>- Pendidikan umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekeloh WBP</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Pembinaan/istirahat</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>
		12.00 - 13.30	13.00 M. A. Apel siang	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	Raga Melayu - Siang
		13.30 - 16.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLOK KURJUNGAN II</li> <li>- Bina/istirahat</li> <li>- Bina/istirahat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekeloh WBP</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>
		16.00 - 17.30	Giat Raga Perawatan	WBP - Bina/istirahat	Sebagai Pengawasan	Raga Melayu - Malam
		17.45 - 18.00	Apel Pengantar Malam	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	
		18.00 - 20.30	Sholat, istirahat malam	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	
		21.00 - 04.00	istirahat / tidur	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	
03 KAMIS		06.45 - 07.00	Apel pagi/istirahat	Sekeloh Penghulu WBP	Sebagai Pengawasan	Raga Melayu - Pagi
		07.00 - 07.45	Pembinaan Makan Pagi	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	
		08.00 - 09.00	Giat Raga - Senam	Sekeloh WBP BLOK A & B	Sebagai Pengawasan	
		09.00 - 12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLOK KURJUNGAN I</li> <li>- Bina/istirahat, PPH</li> <li>- Bina/istirahat</li> <li>- Pendidikan umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekeloh WBP</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Pembinaan/istirahat</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>
		12.00 - 13.30	13.00 M. A. Apel siang	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	Raga Melayu - Siang
		13.30 - 16.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>BLOK KURJUNGAN II</li> <li>- Bina/istirahat</li> <li>- Bina/istirahat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekeloh WBP</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> <li>Sebagai Pengawasan</li> </ul>
		16.00 - 17.30	Giat Raga Perawatan	WBP - Bina/istirahat	Sebagai Pengawasan	Raga Melayu - Malam
		17.45 - 18.00	Apel Pengantar Malam	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	
		18.00 - 20.30	Sholat, istirahat malam	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	
		21.00 - 04.00	istirahat / tidur	Sekeloh WBP	Sebagai Pengawasan	

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Gambar 3

## Jadwal Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas I Makassar

		1	2	3	4	5	6	7
04	K A M I S	06.45 - 07.30	Apel pagi/pagi (M)	Sekolah Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus (WSP)	Rapat Rutin (M)
		07.30 - 07.45	Pembinaan & Makan Pagi	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	
		08.00 - 09.00	Chak Rana / Jember	Sekolah WSP (KLP & DLP)	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	
		09.00 - 12.00	- BINAAN (KLP & DLP) - BINAAN (KLP & DLP) - BINAAN (KLP & DLP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	
		12.00 - 13.00	15.00 M.A. Apel Sana	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Apel siang pengkhus
		13.00 - 14.00	- BINAAN (KLP & DLP) - BINAAN (KLP & DLP)	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	
		14.00 - 17.30	Chak Rana / Jember	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	
05	J U M ' A T	06.45 - 07.30	Apel pagi/pagi (M)	Sekolah Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus (WSP)	Rapat Rutin (M)
		07.30 - 07.45	Pembinaan & Makan Pagi	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	
		08.00 - 09.00	Chak Rana / Jember	Sekolah WSP (KLP & DLP)	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	
		09.00 - 12.00	- BINAAN (KLP & DLP) - BINAAN (KLP & DLP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	
		12.00 - 13.00	15.00 M.A. Apel Sana	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Apel siang pengkhus
		13.00 - 14.00	- BINAAN (KLP & DLP) - BINAAN (KLP & DLP)	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	
		14.00 - 17.30	Chak Rana / Jember	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Gambar 4

## Jadwal Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas I Makassar

		1	2	3	4	5	6	7
06	S A B T U	06.45 - 07.30	Apel pagi/pagi (M)	Sekolah Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus (WSP)	Rapat Rutin (M)
		07.30 - 07.45	Pembinaan & Makan Pagi	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	
		08.00 - 09.00	Chak Rana / Jember	Sekolah WSP (KLP & DLP)	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	
		09.00 - 12.00	- BINAAN (KLP & DLP) - BINAAN (KLP & DLP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	
		12.00 - 13.00	15.00 M.A. Apel Sana	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Apel siang pengkhus
		13.00 - 14.00	- BINAAN (KLP & DLP) - BINAAN (KLP & DLP)	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	
		14.00 - 17.30	Chak Rana / Jember	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	
07	M I N G G U	06.45 - 07.30	Apel pagi/pagi (M)	Sekolah Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus (WSP)	Rapat Rutin (M)
		07.30 - 07.45	Pembinaan & Makan Pagi	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	
		08.00 - 09.00	Chak Rana / Jember	Sekolah WSP (KLP & DLP)	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	
		09.00 - 12.00	- BINAAN (KLP & DLP) - BINAAN (KLP & DLP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	
		12.00 - 13.00	15.00 M.A. Apel Sana	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Apel siang pengkhus
		13.00 - 14.00	- BINAAN (KLP & DLP) - BINAAN (KLP & DLP)	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	Sekolah WSP	
		14.00 - 17.30	Chak Rana / Jember	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	Pelajar Pengkhus Pelajar Pengkhus (WSP)	

CATATAN : - SETIAP TANGGAL 12 JAM DIKALKANAKAN  
 URUTAN BINAAN & PEMANAJAN NASIONAL  
 - UNTUK KEAMANAN DAN PEMBINAAN (JAWAB) DAPAT DI  
 JAWAB

Makassar, 12 Mei 2018  
 KEPALA  
 Maresdin Simper  
 NIP. 19640425 198001 1 367

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Dari gambar diatas, dapat diketahui jadwal kegiatan pembinaan Warga Binaan di Lapas Kelas I Makassar dengan cukup disiplin dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dengan adanya jadwal tersebut diharapkan warga binaan dapat mempergunakan waktu yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang ada yang sudah dijadwalkan dengan harapan agar narapidana menerima dan menjalani pembinaan dengan baik dan berguna untuk kehidupannya kelak.

Selain itu, dari jadwal diatas juga kita dapat melihat bagaimana kinerja para petugas Lapas dalam memberikan pembinaan terhadap warga binaan yang sesuai aturan dan tetap menghormati HAM, seperti mendapatkan pendidikan keagamaan, perawatan yang layak serta memberikan jadwal khusus bagi warga binaan untuk mendapatkan kunjungan oleh keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan berdasarkan jadwal kegiatan para warga binaan sudah sesuai aturan dan tetap menghormati HAM para warga binaan.

Merupakan tugas yang berat bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan para warga binaan untuk merubah menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya sendirinya menjadi lebih baik. Khususnya untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang merupakan tempat pembinaan para warga binaan yang memiliki latar permasalahan yang berbeda-beda tiap warga binaan, sehingga diperlukan metode khusus dan tepat agar bisa merubah warga binaan sebagaimana tujuan adanya

lembaga pemasyarakatan sebagai wadah bagi para warga binaan agar bisa berubah menjadi lebih baik atas kesadarannya sendiri.<sup>2</sup>

Dalam mencapai tujuannya, tahapan pembinaan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yaitu<sup>3</sup>:

#### Tahapan Pertama:

Pada tahap ini setiap wargabinaan yang masuk ke Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap awal. Kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian waktunya dimulai pada saat bersangkutan berstatus sebagai warga binaan sampai dengan 6 bulan hingga 12 bulan dari masa hukuman pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimum.

#### Tahapan Kedua:

Jika pembinaan terhadap warga binaan yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Lapas sudah dicapai cukup kemajuan yang ditandai

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan A.M Hamka, Staf bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017

<sup>3 3</sup> Wawancara dengan Surya Wijaya, Staf bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 10 Juli 2017



mulai adanya keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan serta tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepada warga binaan yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui *medium security*.

#### Tahapan Ketiga:

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Lapas telah dicapai cukup kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaannya masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*. Tahap ini dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  masa pidananya. Pada tahap ini warga binaan sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *medium security*.

#### Tahap Keempat:

Jika proses pembinaan telah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman dari warga binaan yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap warga binaan yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau

pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Bapas yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

**TABEL 1**

**Hak Warga Binaan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan**

No.	Hak Warga Binaan	Frekuensi				Persentase				Total
		SB	B	C	KB	SB	B	C	KB	
1.	Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya	8	15	2	-	32%	60%	8%	-	<b>100%</b>
2.	Menyampaikan keluhan	7	18	-	-	28%	72%	-	-	<b>100%</b>
3.	Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak	14	10	1	-	56%	40%	4%	-	<b>100%</b>
4.	Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan	9	15	1	-	36%	60%	4%	-	<b>100%</b>

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

Tabel di atas terlihat bahwa terdapat empat (4) hak dari sekian banyak hak-hak warga binaan yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak yang pertama adalah hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, dalam tabel tersebut (tabel 1) sebanyak 8 (32%) warga binaan yang menjawab sangat baik (SB) dan sebanyak 15 (60%) yang menjawab baik (B) dan hanya 2 (8%) warga binaan yang menjawab cukup (C). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak warga binaan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya terpenuhi dengan

baik. Hal ini dibenarkan dari hasil wawancara dengan warga binaan Muh. Nur Ikhsan bahwa pemberian hak untuk melakukan ibadah sudah dijalankan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, hanya saja kurangnya kesadaran dari warga binaan dalam menjalankan ibadah sedangkan fasilitas sudah dipersiapkan.<sup>4</sup> Dengan terpenuhinya hak tersebut, maka hak warga binaan yang terdapat dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>5</sup> yang diambil dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada dalam Pasal 28E UUD 1945.<sup>6</sup>

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Selanjutnya hak yang kedua yang terdapat dalam tabel 1 adalah hak menyampaikan keluhan. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam kehidupan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar memiliki banyak masalah baik masalah yang ada dalam lingkup lembaga pemasyarakatan ataupun masalah yang ada di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan. Namun terkait dalam kehidupan warga binaan, sehingga masalah yang dihadapi oleh warga binaan terkadang tidak mampu diselesaikan sendiri oleh warga binaan. Olehnya itu, warga binaan memerlukan wadah atau tempat untuk menyampaikan keluhan. Dalam hal ini, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, sehingga dibutuhkan petugas yang responsif

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Muh. Nur Ikhsan, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>6</sup> UUD 1945

terhadap keluhan. Melihat data di atas (Tabel 1) dapat disimpulkan dengan melihat data yang menjawab sangat baik (SB) sebanyak 7 orang (28%) dan yang menjawab baik (B) sebanyak 18 orang (72%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa keluhan-keluhan dari warga binaan mendapat respon yang baik dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Dalam UUD 1945 Pasal 28H<sup>7</sup>

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun

Selanjutnya Hak yang ketiga adalah hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Dalam UUD 1945 Pasal 28H, Pasal tersebut menjamin kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tidak terkecuali warga binaan Lapas Kelas I Makassar meskipun berada dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan melihat Tabel 1 diatas sebanyak 14 orang (56%) yang menjawab sangat baik (SB), yang menjawab baik (B) sebanyak 10 orang (40%) dan hanya 1 (4%) warga binaan yang merasa pelayanan kesehatan dan makanan layak yang menjawab cukup (C). Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahri selaku warga binaan bahwa pemberian hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sudah berjalan dengan baik dan ditambah lagi dengan kesadaran para warga binaan yang

---

<sup>7</sup> UUD 1945

senantiasa menjaga kebersihan lingkungan.<sup>8</sup> Dengan demikian, hak warga binaan melihat data (Tabel 1) mengindikasikan bahwa hak dari warga binaan sudah terpenuhi dengan baik.

Dalam keseharian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, warga binaan memiliki jadwal keseharian dan beberapa warga binaan memiliki jadwal pekerjaan rutin. Dengan demikian, keahlian atau pekerjaan atau keahlian dari warga binaan, berhak untuk mendapat upah atau premi. Melihat data Tabel 1 sebanyak 9 (36%) warga binaan yang menjawab sangat baik (SB), yang menjawab baik (B) sebanyak 15 (60%) warga binaan dan hanya 1 (4%) yang menjawab cukup (C). Dapat ditarik kesimpulan bahwa hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan sudah terpenuhi dengan baik.

**TABEL 2**

**Hak Warga Binaan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan**

No.	Hak Warga Binaan	Frekuensi				Persentase				Total
		SB	B	C	KB	SB	B	C	KB	
1.	Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani	8	16	1	-	32%	64%	4%	-	<b>100%</b>
2.	Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya	13	12	-	-	52%	48%	-	-	<b>100%</b>
3.	Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)	9	16	-	-	36%	64%	-	-	<b>100%</b>

<sup>8 8</sup> Wawancara dengan Fahri, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017

4.	Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga	10	13	2	-	40%	52%	8%	-	<b>100%</b>
----	--	----	----	---	---	-----	-----	----	---	-------------

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Kemudian Pada tabel 2 di atas terlihat bahwa terdapat empat (4) hak dari yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak yang pertama adalah hak untuk Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, dalam tabel tersebut (tabel 1) sebanyak 8 (32%) warga binaan yang menjawab sangat baik (SB) dan sebanyak 16 (64%) yang menjawab baik (B) dan hanya 1 (4%) warga binaan yang menjawab cukup (C). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak warga binaan untuk Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmaninya terpenuhi dengan baik. Hal ini dibenarkan dengan hasil wawancara dengan Muh. Yunus selaku warga binaan bahwa pelaksanaan pemberian perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani sudah terpenuhi dengan baik. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sudah mengatur jadwal untuk warga binaan untuk senam/olahraga setiap pagi dan sore hari.<sup>9</sup> Dengan terpenuhinya hak tersebut, hak warga binaan yg terdapat dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>10</sup> telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar seperti berikut :

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Dalam pelayanan kesehatan ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar menyediakan satu (1) Poliklinik, satu (1)

<sup>9</sup> Wawancara dengan Muh. Yunus, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Dokter Umum, satu (1) Dokter Gigi, dan dua (2) Perawat. Dalam sehari Lapas memberi 3 kali jatah makan yakni pagi hari, siang hari dan malam hari. Untuk pelayanan kesehatan di Lembaga Kelas I Makassar menyediakan satu (1) poliklinik dengan satu (1) dokter umum, (1) dokter gigi dan (2) perawat. Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada warga binaan pemasyarakatan. Perawatan rohani yang dimaksud adalah berupa ceramah, bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar menyediakan guru atau ahli agama untuk mengajarkan warga binaan pemasyarakatan yang baru atau ingin mengaji atau seputar pemahaman agama. Perawatan jasmani berupa:

1. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi. Kegiatan olahraga tersebut berupa senam, voli, badminton, dan lainnya. Sedangkan kegiatan rekreasi berupa event atau lomba yang diadakan oleh lembaga pemasyarakatan.
2. Pemberian perlengkapan pakaian berupa baju, kaos, dan celana.
3. Pemberian perlengkapan mandi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar memberikan fasilitas alat mandi berupa pasta gigi dan sikat gigi setiap bulannya kepada semua warga binaan pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Jika ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia (HAM) hak ini tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Surya Wijaya, Staf bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 10 Juli 2017

<sup>12</sup> UUD 1945

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Selanjutnya hak yang kedua yang terdapat dalam tabel 2 adalah hak Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Waktu kunjungan yang disediakan Lapas Kelas I Makassar adalah pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. Dalam hal ini, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang bertugas di tempat kunjungan wajib untuk memeriksa dan meneliti identitas diri dari pengunjung dan melakukan pengecekan terhadap pengunjung dan memeriksa barang bawaannya. Sehingga dibutuhkan petugas yang responsif dan teliti. Melihat data di atas (Tabel 2) dapat disimpulkan dengan melihat data yang menjawab sangat baik (SB) sebanyak 13 orang (52%) dan yang menjawab baik (B) sebanyak 12 orang (48%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa warga binaan telah mendapat respon yang baik dari haknya sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Narapidana tidak serta merta dapat mengajukan remisi dikarenakan pengajuan remisi ini dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan melalui bagian registrasi yang mendata siapa saja warga binaan yang berhak mendapatkan remisi setelah itu diajukan ke Menteri Hukum



dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Remisi dibagi menjadi dua (2) yakni:

- 1) Remisi Umum, yang diberikan pada hari besar peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, dan
- 2) Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah yang paling dimuliakan oleh penganut agama tersebut.

Besarnya remisi umum adalah satu (1) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan, 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Sedangkan remisi khusus adalah 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Pasal tersebut menjamin kesehatan serta berhak Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan melihat Tabel 2 diatas sebanyak 9 orang (36%) yang menjawab sangat naik (SB), yang menjawab baik (B) sebanyak 16 orang (64%). Dengan demikian, hak warga binaan melihat data (Tabel 2) mengindikasikan bahwa hak dari warga binaan sudah terpenuhi dengan baik.

Hak selanjutnya yaitu Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas bahwa warga binaan pemasyarakatan yang berhak mendapatkan asimilasi adalah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar beberapa tahun terakhir tidak menjalankan kegiatan asimilasi sebagai mestinya dimana warga binaan pemasyarakatan diberikan kesempatan untuk berbaur di luar lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat dengan mengikuti suatu kegiatan. Namun bentuk kegiatan asimilasi yang dilakukan Lapas Klas I Makassar yaitu pada kegiatan kerja yakni juru parkir disekitar Lapas (dalam Lapas).<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan asimilasi, lamanya warga binaan berada di luar lembaga pemasyarakatan ditentukan oleh bentuk kegiatan yakni kegiatan pendidikan, bimbingan dan latihan keterampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif ditempat kegiatan. Untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga dipergunakan ditempat kerja paling lama 9 (Sembilan) jam sehari termasuk waktu perjalanan. Kegiatan asimilasi ini sebelumnya harus memerlukan izin dari

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan A.M Hamka, Staf bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017

pihak keluarga, lingkungan dan pengawasan terhadap warga binaan yang sedang melaksanakan kegiatan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama, dan kegiatan sosial dilaksanakan secara tertutup oleh petugas lembaga pemasyarakatan dengan berpakaian dinas. Sedangkan pengawasan terhadap warga binaan yang sedang melaksanakan kegiatan kerja diluar lembaga pemasyarakatan bekerjasama dengan anggota masyarakat dengan dilaksanakan oleh petugas Lapas dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, pemerintah daerah dan hakim wasmat setempat.

Warga binaan pemasyarakatan tersebut tidak serta merta bisa mendapatkan haknya yakni asimilasi tersebut, karena hanya warga binaan pemasyarakatan yang di anggap oleh Lapas memenuhi kriteria mendapatkannya. Kriteria yang dimaksud adalah, warga binaan pemasyarakatan yang sudah mengikuti pembinaan tahap II yang dilakukan pengusulan oleh Bapas dimana dilakukannya survey tempat tinggal warga binaan pemasyarakatan dan dilihat tingkat kesulitan dari pengamanan tersebut.<sup>14</sup>

Cuti mengunjungi keluarga diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02. Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana. Narapidana berkesempatan mengunjungi keluarganya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam. Yang termasuk keluarga dalam keputusan tersebut ialah istri/suami, anak kandung/angkat/tiri, orang tua kandung/angkat/tiri, saudara kandung/angkat/tiri/ipar, keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua. Cuti mengunjungi keluarga diberikan kepada

---

<sup>14 14</sup> Wawancara dengan Surya Wijaya, Staf bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 10 Juli 2017

narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang masa pidananya 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau masa pidananya lebih banyak 5 (lima) tahun atau lebih sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Melihat data Tabel 2 sebanyak 10 (40%) warga binaan yang menjawab sangat baik (SB), yang menjawab baik (B) sebanyak 13 (52%) warga binaan dan hanya 2 (8%) yang menjawab cukup (C). Dapat ditarik kesimpulan bahwa hak Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga sudah terpenuhi dengan baik.

**TABEL 3**

**Hak Warga Binaan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan**

No.	Hak Warga Binaan	Frekuensi				Persentase				Total
		SB	B	C	KB	SB	B	C	KB	
1.	Mendapatkan pendidikan dan pengajaran	5	12	8	-	20%	48%	32%	-	<b>100%</b>
2.	Mendapatkan pembebasan bersyarat	11	14	-	-	44%	56%	-	-	<b>100%</b>
3.	Mendapatkan cuti menjelang bebas	7	18	-	-	28%	72%	-	-	<b>100%</b>
4.	Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang	6	7	10	2	24%	28%	40%	8%	<b>100%</b>

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Tabel 3 di atas terlihat bahwa terdapat empat (4) hak-hak warga binaan yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak yang

pertama adalah hak untuk Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, dalam tabel tersebut (tabel 3) sebanyak 5 (20%) warga binaan yang menjawab sangat baik (SB) dan sebanyak 12 (48%) yang menjawab baik (B) dan hanya 8 (32%) warga binaan yang menjawab cukup (C). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak warga binaan untuk Mendapatkan pendidikan dan pengajaran terpenuhi dengan baik. Dengan terpenuhinya hak tersebut, maka hak warga binaan yang terdapat dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>15</sup> yang diambil dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.<sup>16</sup>

- 1) Setiap Orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Warga binaan pemasyarakatan berhak diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran yang Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar merupakan kegiatan yang baru beberapa tahun ini. Pendidikan dan pengajaran yang dilakukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sekitar empat (4) warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti program paket c yang di adakan oleh Pemerintah. Namun dalam hal ini, belum ada pengajar khusus untuk disediakan dan di tempatkan oleh lembaga pemasyarakatan, hanya petugas Lapas yang bersedia dan siap untuk menjadi guru atau pamong dari warga binaan pemasyarakatan tersebut.<sup>17</sup> Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Di

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>16</sup> UUD 1945

<sup>17</sup> Wawancara dengan A.M Hamka, Staf bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017

Makassar dan Sanggar Kegiatan Belajar. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, tahun berhasil mendidik atau mengajarkan pendidikan hingga warga binaan pemasyarakatan kuliah dengan program kuliah terbuka.

Selanjutnya hak yang kedua yang terdapat dalam (Tabel 3) adalah hak mendapatkan pembebasan bersyarat. Setiap warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan 16 KUHP. Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usulan Kepala Lapas. Dalam hal ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Sehingga dibutuhkan petugas yang dapat menyampaikan informasi terkait warga binaan, sehingga dapat diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Melihat data di atas (Tabel 3) dapat disimpulkan dengan melihat data yang menjawab sangat baik (SB) sebanyak 11 orang (44%) dan yang menjawab baik (B) sebanyak 14 orang (56%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa hak Mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar sudah berjalan Baik.

Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Pasal tersebut menjamin pelaksanaan hak Mendapatkan cuti menjelang bebas. Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana dan Anak didik pidana yang telah menjalani dua per tiga ( $\frac{2}{3}$ ) masa pidana sekurang- kurangnya Sembilan (9) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi

terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan. Dengan melihat Tabel 3 diatas sebanyak 7 orang (28%) yang menjawab sangat naik (SB), yang menjawab baik (B) sebanyak 18 orang (72%). Dengan demikian, hak warga binaan melihat data (Tabel 3) mengindikasikan bahwa hak dari warga binaan sudah terpenuhi dengan baik.

Dalam keseharian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, warga binaan memiliki hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar Lapas haruslah mendapat izin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan dan media massa lainnya harus tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan jadwal pelayanan dan tata cara peminjaman bahan bacaan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Setiap blok di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar menyediakan 1 (satu) buah televisi dan 1 (satu) telepon umum yang bisa digunakan warga binaan pemasyarakatan untuk menelpon pihak keluarga. Warga binaan pemasyarakatan dilarang membawa alat komunikasi sendiri (handphone), jika warga binaan pemasyarakatan tersebut ketahuan membawa alat komunikasi maka handphone tersebut diambil dan tidak dikembalikan serta warga binaan pemasyarakatan tersebut mendapatkan sanksi. Dengan demikian, berhak untuk mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media agar dapat memperoleh

pengertian yg lebih luas.<sup>18</sup> Melihat data Tabel sebanyak 6 (24%) warga binaan yang menjawab sangat baik (SB), yang menjawab baik (B) sebanyak 7 (28%) warga binaan 10 (40%) yang menjawab cukup (C) dan ada pula warga binaan yang menjawab kurang baik (KB) sebanyak 2 Orang (8%). Dapat ditarik kesimpulan bahwa hak Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang masih kurang terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan tahapan pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, maka penulis berkesimpulan bahwa dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan masih sangat menjunjung tinggi HAM sehingga dalam proses pembinaannya tersebut masih sangat terjaga agar tidak terjadinya pelanggaran HAM terhadap para warga binaan.

### ***C. Hambatan-hambatan yang Dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam Melakukan Proses Pembinaan pada Warga Binaan***

Secara umum pengetahuan pengetahuan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar tentang hak-hak warga binaan cukup menyeluruh, meskipun pengetahuan tersebut sebagian besar belum dalam tahap kesadaran pelaksanaan (masih dalam bentuk pengetahuan saja). Hal ini disebabkan banyaknya hambatan dalam pelaksanaan hak-hak tersebut, antara lain:

#### **a. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah SDM sebagai petugas lembaga pemasyarakatan masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pelatihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Surya Wijaya, Staf bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 10 Juli 2017



manusia petugas pemasyarakatan adalah sangat penting. Disamping itu, juga sangat penting memberikan keterampilan tambahan bagi petugas Lapas berupa berbagai keterampilan yang dapat diajarkan dan bermanfaat bagi warga binaan.

Kemudian dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, pegawai yang terdapat khususnya pegawai pembinaan hanya terdapat 7 orang, yang terdiri dari 2 orang yang berpendidikan S2, 3 orang yang berpendidikan S1 dan 2 lainnya berpendidikan SMA/D3.<sup>19</sup> Kurangnya tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dirasakan memberi pengaruh yang besar bagi proses pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Jumlah tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sangat berbanding terbalik dengan warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan jumlah warga binaan per bulan Juli 2017 sebanyak 1.107 warga binaan. Jika dibandingkan dari jumlah warga binaan dan jumlah petugas tidak sesuai dengan standar pemasyarakatan. Padahal idealnya 1 petugas menjaga atau membina 50 warga binaan.<sup>20</sup> Dengan jumlah seperti itu, maka dibutuhkan tenaga pendidik yang lebih untuk bisa memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak surya wijaya selaku staf pembinaan mengatakan bahwa kurangnya tenaga pembinaan khususnya yang berpendidikan S2 berpengaruh terhadap perencanaan pola pembinaan untuk warga binaan, karena pada dasarnya tenaga atau pegawai yang berpendidikan S2

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Marta Karabua, Staf bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 9 Agustus 2017

<sup>20</sup> Akbar Hadi Prabowo, Dirjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM <http://news.okezone.com/read/2016/03/26/337/1346383/perbandingan-jumlah-sipir-dan-narapidana-di-indonesia-tidak-ideal> (diakses tanggal 30 Juli 2017)

memiliki peran dalam perencanaan pola pembinaan dan pegawai yang berpendidikan S1 lebih kepada pelaksanaan pembinaan sama dengan pegawai yang berpendidikan SMA.<sup>21</sup> Keadaan seperti ini dapat menghambat pendidikan warga binaan dalam pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

#### b. Kendala Dana/Anggaran

Dana merupakan salah satu faktor penting yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam pelaksanaannya membutuhkan berbagai peralatan. Sebab program pembinaan tidak hanya satu melainkan sangat bermacam-macam sesuai dengan minat dan keterampilan yang dimiliki oleh warga binaan yang mungkin dibutuhkan bagi warga binaan setelah mereka bebas dan kembali ke lingkungannya. Menurut hasil wawancara dengan bapak Surya Wijaya<sup>22</sup>, yang telah penulis lakukan di lokasi penelitian, kendala dana merupakan faktor terpenting dalam proses pembinaan para warga binaan dan juga salah satu faktor penghambat dalam memberikan pembinaan bagi para warga binaan, disamping itu hambatan lainnya seperti kurangnya SDM dan sarana prasarana yang kurang memadai.

Minimnya anggaran untuk pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Surya Wijaya, Staf bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 10 Juli 2017

<sup>22</sup> Wawancara dengan Surya Wijaya, Staf bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 10 Juli 2017.

mengakibatkan tidak berjalan dan tidak dapat terealisasinya semua program pembinaan bagi warga binaan lapas. Dana yang dialokasikan untuk keperluan pelatihan kerja atau keterampilan sangat sedikit sehingga fasilitas (alat kerja) yang di dapatkan jauh dari kata memuaskan dan kurang beragam. Selain untuk keperluan alat kerja, yang sangat memprihatinkan adalah keterbatasan jumlah dan kualitas alat yang dipakai yang nantinya akan diolah oleh warga binaan. Kurangnya suplay anggaran untuk pendidikan. Anggaran untuk pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses pendidikan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terdapat keterkaitan yang erat antara anggaran atau biaya dengan pemenuhan kebutuhan lainnya guna kelancaran proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.<sup>23</sup>

#### c. Kendala Sarana dan Prasarana

Untuk menjadikan warga binaan yang sebelumnya tidak diterima di masyarakat karena dianggap meresahkan dengan berbagai tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan karena melanggar aturan atau merupakan tindakan pidana sehingga dalam proses pemidanaaan dibutuhkan pembinaan yang ekstra dan khusus kepada warga binaan atau dengan kata lain pemberian pemberian kemampuan atau keterampilan yang baik kepada warga binaan sehingga kelak setelah selesai menjalani masa pidananya maka warga binaan tersebut sudah memiliki keterampilan sehingga bisa diterima. Namun untuk mencapai itu semua dibutuhkan sarana dan pra sarana yang dapat mendukung proses pemberian atau pengajaran bakat atau keterampilan kepada warga binaan. Sarana dan prasarana

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan A.M Hamka, Staf bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017

yang tidak memenuhi syarat juga sangat menghambat pelaksanaan hak-hak warga binaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan A.M Hamka staf bagian Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, keterbatasan penyediaan sarana untuk melakukan proses pendidikan dan pengajaran seperti alat tulis kantor, kursi, buku, dan peralatan-peralatan penunjang lainnya. Keadaan ini tentu saja membuat warga binaan tidak dapat melakukan pendidikan dengan baik sesuai standarisasi yang ditetapkan<sup>24</sup>. Keadaan seperti ini dapat menghambat proses pembinaan bagi warga binaan.

**Tabel 4**

**Jumlah Warga Binaan dan Kapasitas yang Tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Bulan Agustus 2017**

Tahanan dan Narapidana	Kapasitas	Over Kapasitas
1112	740	372

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kapasitas yang tersedia sudah tidak sesuai lagi dengan banyaknya jumlah narapidana sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Kurangnya media untuk mengembangkan keterampilan bagi warga binaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bagian Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sangat terbatas dan masih ada alat-

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan A.M Hamka, Staf bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017

alat keterampilan yang sudah tua dan hampir rusak, atau sudah tidak dapat dipergunakan, sehingga sangat berpengaruh dalam menunjang program pembinaan.<sup>25</sup> Sehingga, dari seluruh hambatan tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi faktor penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Hal ini harusnya menjadi perhatian yang cukup serius bagi pemerintah untuk menciptakan pembinaan yang baik di dalam lembaga pemasyarakatan dan pelaksanaan program pembinaan dapat berjalan secara efektif, agar warga binaan tetap mendapatkan hak-haknya di dalam lembaga pemasyarakatan.



---

<sup>25</sup>Wawancara dengan A.M Hamka, Staf bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 16 Agustus 2017.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis diatas, maka penulis menyimpulkan Bahwa:

1. Proses pembinaan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dengan mengacu pada pasal 28, 28A-28J UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rumah Tahanan. Berdasarkan tahapan pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan masih sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sehingga dalam proses pembinaannya tersebut masih sangat terjaga agar tidak terjadinya pelanggaran HAM terhadap para warga binaan
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam melakukan proses pembinaan pada warga binaan dapat ditemukan dalam beberapa hal diantaranya sumber daya manusia (petugas Lapas) masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan, Minimnya dana/anggaran untuk pembinaan warga binaan, serta sarana prasarana yang kurang memadai.

**B. Saran**

1. Pemerintah perlu memperketat program pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan agar pembinaan tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi warga binaan setelah mereka bebas.
2. Pemerintah perlu memperbaiki sistem pembinaan mulai dari sumber daya manusia (petugas), dana/anggaran serta sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishingt, 2006.
- Kadri, Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kumleko, Mujaid,dkk. *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2015.
- Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Ed.2.Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Natsif, Fadli Andi, *Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, Ed.1.Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Samosir, Djisman C, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Cet.1, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Sunarso, Siswanto, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soeharto, H, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007
- Soekanto, Sarjoeno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 1986
- Syamsuddin, Rahman, Ismail Rais, *Merajut Hukum di Indoneisa*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Ubaedillah, A., *Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet.5, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Ed.1.Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



Widodo, Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

### **Skripsi**

Herlina, *“Efektifitas Pembinaan Warga Binaan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Makassar”*, Skripsi (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2013)

### **Sumber Lainnya**

<http://news.okezone..com/read/2016/03/26/337/1346383/perbandingan-jumlah-sipir-dan-narapidana-di-indonesia-tidak-ideal> (diakses tanggal 30 Juli 2017)



# LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi  
Ilmu Hukum  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di  
Samata-Gowa

*Assalamu alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR KHALISAH NAISY  
NIM : 10500113132  
Semester/Klpl : VI / (Enam) C  
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

1. Tinjauan kriminologi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Sinjai
  2. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pekerja anak di bawah umur di Kabupaten Sinjai
- Acc 8/6/16 (3) Tinjauan hukum mengenai pola pembinaan narapidana ditinjau dari perspektif HAM pada Rutan Kelas IA Makassar

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb.*

Samata, 8 Juni 2016

Mengetahui,  
Penasehat Akademik

(Siti Nurjannah, SH.,MH.)  
NIP:19760822 200312 2 003

Pemohon,

(NUR KHALISAH NAISY)  
NIM : 10500113132

8/6/16.

**IDRIS SYAMSUDDIN**  
NIP 19821287 200901 1 010



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**Nomor : 365 Tahun 2017**  
**TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** :
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
  - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
  4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
  5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- a. Menunjuk saudara :
1. Ahkam Jayadi, SH., M.H
  2. Dr. Fadli Andi Natsif, SH., MH

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Nur Khalisah Naisy  
N I M : 10500113132  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : " Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan Ditinjau Dari Perspektif HAM Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar"

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

Pada tanggal : 4 April 2017



**Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag**

196210161990031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923*  
*Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36, Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836*

Nomor : 1718/SI.3A/PP.00.9/04/2017  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

An. Nur Khalisah Naisy/10500113132

Kepada Yth;

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Ahkam Jayadi, SH.,MH.           | Sebagai Pembimbing I.  |
| 2. Dr. Fadli Andi Natsif, S.H.,MH. | Sebagai Pembimbing II. |
| Di-                                |                        |

Samata

Bersama ini kami mengundang bapak/ibu/saudara, untuk menghadiri **Seminar** dan melaksanakan serta bertindak selaku **Pembimbing** pada **Seminar Draft Skripsi**, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 April 2017  
Waktu : 10:00 WITA - selesai  
Tempat/Ruangan : Ruang 107 Fakultas Syariah Dan Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan Ditinjau Dari Perspektif HAM Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih

Samata, 22 Maret 2017

Wassalam,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Catatan :

- SK Pembimbing Draft Skripsi terlampir
- Pembimbing diharapkan hadir



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**DRAFT SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM MENGENAI POLA PEMBINAAN WARGA BINAAN DITINJAU**  
**DARI PERSPEKTIF HAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IA**  
**MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

**NUR KHALISAH NAISY**  
**NIM : 10500113132**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan

Penulisan skripsi

Pada tanggal : 2 Mei 2017

**Pembimbing I**



Ahkam Jayadi, S.H., M.H  
NIP. 19611024 198703 1 003

**Pembimbing II**



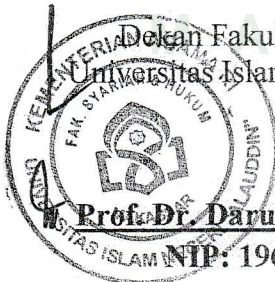
Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.  
NIP. 19661016 201411 1 001

Diketahui Oleh  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Istiqamah, SH., MH  
NIP: 19680120 199503 2 001

Mengesahkan



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP: 19621016 199003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)*  
*Kampus 2 Jln. Yasin Limpo No.36 SamataSungguminasa-Gowa.Tlp. (0411)424835 Fax 424836*

Nomor : SL.1/PP.00.9/2071/2017  
Lamp : 1 (satu) exemplar  
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 13 Juni 2017

Kepada

**Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan**  
**Cq. Kepala UPT P2T BKPM D Prov. Sul-Sel**  
Di-  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Nur Khalisah Naisy
NIM	: 10500113132
Semester	: VIII (Delapan)
Fak/jurusan	: Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Alamat	: Jl. Tamangapa Raya, Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya adalah:

**“Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”**

Dengan Dosen Pembimbing: **1. Ahkam Jayadi, S.H., M.H**  
**2. Dr. Fadli Andi Natsif, SH., M.H**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhitung mulai tanggal 4 Juli s/d 11 Agustus 2017

Demikian permohonan kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*  
A.n. Rektor,  
Dekan Fakultas Syariah & Hukum,

**Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag**  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa





1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 8 8 5 8

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Alam : 8719/S.01P/P2T/06/2017

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Kanwil

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan  
HAM Prov. Sulsel

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/2078/2017 tanggal 13 Juni 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NUR KHALISAH NAISY**  
Nomor Pokok : 10500113132  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" TINJAUAN HUKUM MENGENAI POLA PEMBINAAN WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 Juli s/d 11 Agustus 2017**

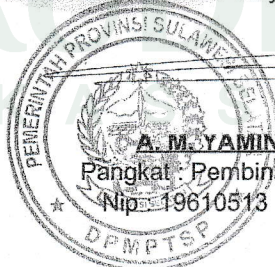
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 14 Juni 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertiinggal.







Nomor : W.23.UM.01.01- 168  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Penelitian

19 Juni 2017

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar  
di - Makassar

Berkenaan dengan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 8710/S.01P/P2T/06/2017 tanggal 14 juni 2017 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Nur Khalisah Naisy  
Nomor Pokok : 10500113132  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jln. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk mengadakan penelitian di Lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar untuk menyusun **Skripsi** dengan judul "**TINJAUAN HUKUM MENGENAI POLA PEMBINAAN WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**", yang dilaksanakan mulai tanggal 04 Juli 2017 s/d 11 agustus 2017, sehubungan dengan hal tersebut, kiranya yang bersangkutan dapat diberikan data dan informasi dalam rangka penelitian dengan ketentuan harus mentaati segala ketentuan yang berlaku pada Lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Demikian disampaikan, atas perkenaanannya diucapkan terimah kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah,  
Kepala Divisi Administrasi  
u.b. Kepala Bagian Umum



Mulyadi Arifah, SH, MH  
NIP. 19641229 199203 1 001

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar (Sebagai Laporan)
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar
3. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar.
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Peringgal.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**  
JALAN SULTAN ALAUDDIN NO. 191, Telp. (0411) 868547 MAKASSAR  
Email : [kepegawaianlapas@gmail.com](mailto:kepegawaianlapas@gmail.com)

### **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No : W.23.PAS.PAS1.UM.01.01-1089/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Nur Khalisah Naisy**  
N I M : 10500113132  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jln. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata,  
Sungguminasa-Gowa

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar' dari tanggal 4 Juli 2017 s/d 11 Agustus 2017 dalam rangka penyusunan **Skripsi** dengan judul : "**TINJAUAN HUKUM MENGENAI POLA PEMBINAAN WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12 September 2017

Kepala Bagian Tata Usaha



NIP. 19640401199203 2 001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 666 Tahun 2017

**TENTANG**

**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)  
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 31 Mei 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;  
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penyerahan dan Penyerahan atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 untuk Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.  
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

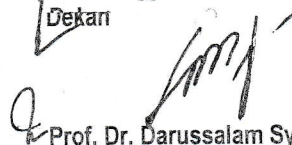
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**

- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;  
**Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keenam** : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SURAT KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 31 Mei 2017  
Dekan

  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 666/TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KETUA/SEK/ANG.
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKDU/DIS	MIKP	
01	02		04	05	06
1	Nur Khalisah Naisy 10500113132	Andi Intan Cahyani, S.Ag, M.Ag	Proh. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag	Ahkam Jaadi, S.H, M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. Mujahidah, SE Nurhayati Wahid

Samata, 31 Mei 2017

Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Nip. 19621016 199003 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulis skripsi ini saudari **NUR KHALISAH NAISY**, Nim. 10500113132, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **"TINJAUAN HUKUM MENGENAI POLA PEMBINAAN WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR"**. Memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar hasil.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

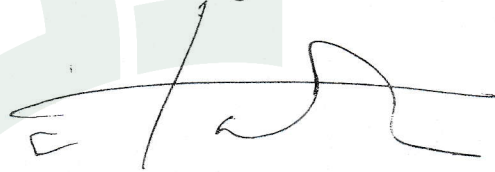
Samata, 9 Agustus 2017

**Pembimbing I**



**Ahkam Jayadi, S.H., M.H**  
NIP. 19611024 198703 1 003

**Pembimbing II**



**Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H**  
NIP. 19661016 201411 1 001

UNIVERSITAS ISLAM  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR



**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : **1230** Tahun 2017

**TENTANG**

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI  
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

**Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : Nur Khalisah Naisy  
N I M : 10500113132  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
Hari/Tanggal : Rabu / 16 Agustus 2017  
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Judul : "Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan  
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas I Makassar"

**Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H  
Penguji I : St. Nurjannah, S.H., M.H  
Penguji II : Dra. Nila Sastrawati, M.SI.  
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE  
2. Nurhayati Wahid

**Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil /Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 14 Agustus 2017

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : SI.1/PP.00.9/2944/2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 14 Agustus 2017

*Kepada*

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag ( Ketua )
  2. Istiqamah, S.H., M.H ( Sekretaris )
  3. St. Nurjannah, S.H., M.H ( Penguji I )
  4. Dra. Nila Sastrawati, M.SI ( Penguji II )
  5. Ahkam Jayadi, S.H., M.H. ( Pembimbing I )
  6. Dr. Fadli Andi Natsif, M.H ( Pembimbing II )
  7. Pelaksana

Di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

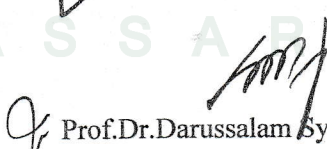
N a m a : Nur Khalisah Naisy  
N I M : 10500113132  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Agustus 2017  
Waktu : Pukul 11.00 – 12.00 Wita  
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*  
Dekan

  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

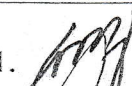
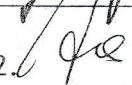
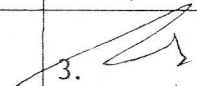
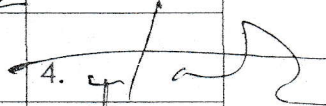

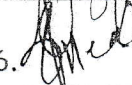
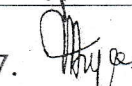
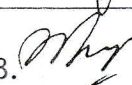
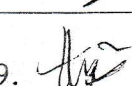
## DAFTAR HADIR UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Nur Khalisah Naisy

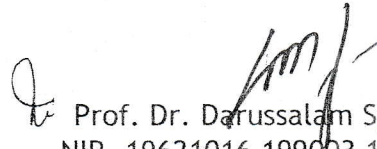
NIM : 10500113132

JURUSAN : Ilmu Hukum (IH)

JUDUL SKRIPSI : " Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	Ketua	1. 
2.	Istiqamah, S.H., M.H	Sekretaris	2. 
3.	Ahkam Jayadi, S.H., M.H	Pembimbing	3. 
4.	Dr. Fadli Andi Natsif, M.H	Pembimbing	4. 
5.	St. Nurjannah, S.H., M.H	Penguji	5. 
6.	Dra. Nila Sastrawati, M.Si	Penguji	6. 
7.	Mujahidah, S.E	Pelaksana	7. 
8.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8. 
9.	Nur Khalisah Naisy	Mahasiswa	9. 

Samata, 16 Agustus 2017  
Ketua Panitia,

  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN**

**MAKASSAR**

Nomor : 1292 Tahun 2017

**TENTANG**

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : Nur Khalisah Naisy  
NIM : 10500113132  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2017  
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
Judul : "Tijauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Istiqamah, S.H, M.H.  
Penguji I : St. Nurjannah, S.H, M.H.  
Penguji II : Dra. Nila Sastrawati, M.Si.  
Pelaksana : 1. Mujahidah, S.E  
2. Nurhayati Wahid

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Samata  
: 22 Agustus 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : 2274/SI.1/PP.00.9/2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 22 Agustus 2017

Kepada

- Yth. 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua )  
2. Istiqamah, S.H, M.H. (Sekertaris)  
3. St. Nurjannah, S.H, M.H. (Penguji I )  
4. Dra. Nila Sastrawati, M.Si. ( Penguji II )  
5. Ahkam Jayadi, S.H, M.H. (Pembimbing I)  
6. Dr. Fadli A. Natsif, M.H. (Pembimbing II)  
7. Pelaksana

Di  
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

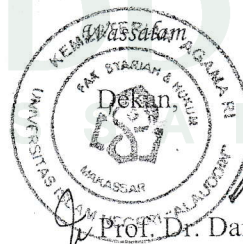
Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Nur Khalisah Naisy  
N I M : 10500113132  
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insha Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2017  
Buka Sidang : 08.30 WITA  
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WITA  
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003



## DAFTAR HADIR UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

Nama : Nur Khalisah Naisy

N I M : 10500113132

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Tinjauan Hukum Mengenai Pola Pembinaan Warga Binaan Dalam  
Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I  
Makassar"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	Ketua	1.
2.	Istiqamah, S.H., M.H	Sekretaris	2.
3.	Ahkam Jayadi, S.H, M.H.	Pembimbing	3.
4.	Dr. Fadli A.Natsif, M.H.	Pembimbing	4.
5.	St. Nurjannah, S.H, M.H.	Penguji	5.
6.	Dra. Nila Sastrawati, M.Si.	Penguji	6.
7.	Mujahidah, S.E.	Pelaksana	7.
8.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8.
9.	Nur Khalisah Naisy	Mahasiswa	9.

Samata, 28 Agustus 2017

Ketua Panitia

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP : 19621016 199003 1 003

## RIWAYAT HIDUP



**Nur Khalisah Naisy** adalah nama penulis skripsi ini.

Penulis lahir dari orang tua, Nur Asyik, S.Sos dan Nur Nani sebagai anak tunggal. Penulis dilahirkan di Kabupaten Sinjai pada tanggal 14 Juli 1995. Lisa adalah nama panggilan penulis. Penulis menempuh pendidikan

dimulai dari SD Negeri 152 Sinjai (Lulus Tahun 2007), melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sinjai (Lulus Tahun 2010) dan SMA Negeri 1 Sinjai (Lulus Tahun 2013). Kemudian bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Hukum.

Dari setiap langkah, penulis menyadari bahwa untuk mencapai keberhasilan harus disertai dengan doa, kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan yang tiada henti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R